



**Kementerian PPN/
Bappenas**

PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN LINTAS SEKTOR

YOSI DIANI TRESNA

DIT. KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

*Disampaikan pada Seri Diskusi Publik JPAI
Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah
Selasa, 31 Mei 2016*



PENDAHULUAN

- Isu kekerasan terhadap anak menjadi perhatian tersendiri dan telah menjadi prioritas dalam pembangunan, dimana penurunan prevalensi kekerasan terhadap anak tertantum menjadi salah satu indikator utama dalam RPJMN 2015-2019.
- Sebagai perwujudan dari hal ini, isu kekerasan anak kemudian diturunkan kedalam kebijakan, yakni Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) 2016-2020.
 - *Stranas PKTA berisi arahan strategis-operasional terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang menjadi isu prioritas baik dalam RPJMN maupun RAN PA 2015-2019.*



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



*Kementerian PPN/
Bappenas*



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERMENKO PMK NO. /2016:

STRATEGI NASIONAL

PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK 2016-2020

Situasi kekerasan terhadap anak di Indonesia

- Hasil Survey Kekerasan terhadap Anak (SKTA):
 - Pada **kelompok umur 18-24 tahun: 1 dari 2 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan** setidaknya mengalami salah satu jenis kekerasan sebelum mereka berumur 18 tahun,
 - **kelompok umur 13-17 tahun: 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan** mengalami kekerasan seksual/fisik/ emosional dalam 12 bulan terakhir.(KPPPA, 2013)
- Penelitian yang dilakukan terhadap 1738 siswa kelas 8 di Jakarta dan Serang menunjukkan bahwa **84 % siswa mengaku pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan di sekolah, dan 75 % mengaku pernah melakukan kekerasan dalam 6 bulan terakhir.** (ICRW, 2015)





- **1 dari 6 perempuan di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun** (BPS, 2012) yang menempatkan anak dalam risiko kesehatan, putus sekolah, dan jerat kemiskinan.
- Sebanyak **26% anak berusia 2-14 tahun mengalami hukuman fisik di rumah** yang dilakukan oleh ibu, pengasuh, atau anggota keluarga lainnya. (BPS, 2014)
- Jumlah laporan kasus kekerasan anak hingga April 2015 mencapai 6.006 kasus. Meningkat signifikan dari tahun 2010 yang hanya 171 kasus, 2011 (2.179), 2012 (3.512), 2013 (4.311), dan 2014 sebanyak 5.066 kasus (KPAI, 2015).

Stranas PKTA 2016-2020: Kebijakan 3 Fungsi

Pemerintah Indonesia (diwakili Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) menerbitkan **Peraturan Menteri No. 2/2016** tentang **Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020** pada 27 Januari 2016

STRANAS 2016-2020 berisi 6 komponen: (1) **Legislasi dan Penerapan Kebijakan**, (2) **Perubahan Norma Sosial yang Mendukung Kekerasan**, (3) **Penguatan Pengasuhan**, (4) **Peningkatan Kemampuan Sosial Anak dalam mencegah dan menangani kekerasan**, (5) **Pengadaan Layanan bagi Korban, Saksi, Pelaku Kekerasan**, (6) **Penguatan Data dan Bukti**

STRANAS 2016 disusun berfungsi sebagai:

Fungsi Koordinasi, mengkoordinasikan lintas-sektor untuk kerja-kerja perlindungan anak di Indonesia

Fungsi Penyelaras, menyelaraskan kebijakan dan program perlindungan anak

Fungsi Pengarah, memperkuat arah kebijakan perlindungan anak untuk mencapai indikator RPJMN 2015-2019 dan Pencapaian Target SDGs khususnya 16.2 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Anak

Fungsi 2: Menyelaraskan kebijakan dan program perlindungan anak

2

Kebijakan dan Program perlindungan anak terdapat di berbagai K/L sektoral: Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial, Hukum dan HAM, dst.

Kerangka hukum yang ada belum mampu memayungi berbagai kebijakan dan program; Belum adanya kerangka operasional yang mampu mengarahkan dan **menyelaraskan** kebijakan dan program perlindungan anak (dari kekerasan) di tingkat nasional dan daerah, terutama dalam jangka pendek dan menengah (RPJMN perlu dioperasionalisasi lebih lanjut ke dalam tataran strategis dan tematik)

Stranas PKTA 2016-2020 berfungsi sebagai kebijakan **penyelaras**, yang bertujuan mengarahkan fokus kebijakan kedalam 6 komponen strategis yang komprehensif

Menyelaraskan program perlindungan anak (dari kekerasan) dapat membantu mengarahkan sumber daya (pendanaan, fokus politik) secara lebih terpusat dan terkoordinasi – untuk program perlindungan anak (dari kekerasan) yang lebih tepat sasaran.

Sebagai **Kebijakan Penyelaras**, komitmen politik dan alokasi sumber daya yang memadai dibutuhkan agar berbagai sektor pemerintah dan non-pemerintah dapat menggunakan Stranas PKTA sebagai acuan kebijakan dan program perlindungan anak

Fungsi 3: Memperkuat arah kebijakan perlindungan anak untuk mencapai indikator RPJMN 2015-2019 dan Pencapaian Target SDGs

3

STRANAS PKTA 2016-2020: 6 Komponen

Disusun melalui:

- ✓ Berbagai kajian (tinjauan literatur) situasi kekerasan anak di Indonesia
- ✓ Studi Evaluasi RAN yang telah/sedang berjalan

- ✓ Konsultasi dengan pemangku kepentingan nasional dan daerah, termasuk anak

- ✓ Berpedoman pada KHA dan berbagai rekomendasi global
- ✓ Merupakan bagian dari implementasi RAN Perlindungan Anak 2016-2020

Disusun untuk mencapai:

SDGs	Nawa Cita	RPJMN
<p>Tujuan 3: Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia</p> <p>Tujuan 16: Mempromosikan masyarakat inklusi dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan efektif di semua tingkatan</p>	<p>4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera</p> <p>5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing</p> <p>6. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan</p>	<p>Bab 2: Pembangunan Sosbud, Agama Bah 7: Bidang Hukum dan Aparatur</p> <p>1. Penguatan sistem untuk perlindungan bagi perempuan dan anak dari kekerasan, termasuk perdagangan melalui pencegahan dan penegakkan hukum</p> <p>2. Memperkuat kapasitas organisasi melalui penguatan sistem hukum, kapasitas, mekanisme kerjasama, sistem data dan informasi</p> <p>3. Penguatan layanan bantuan hukum untuk masyarakat marjinal</p>

Peran Stranas PKTA 2016-2020 yang strategis sebagai **Kebijakan Pengarah** yang disusun berdasarkan kebutuhan nasional dan rekomendasi global, perlu diperkuat dengan mengarusutamakan seluruh kebijakan perlindungan anak dari kekerasan kedalam 6 komponen strategi

Fungsi 3: Memperkuat arah kebijakan perlindungan anak untuk mencapai indikator RPJMN 2015-2019 dan Pencapaian Target SDGs

3.1



Indonesia (diwakili MenegPPPA) baru menandatangani **Surat Komitmen** menjadi bagian dari **Global Partnership to End Violence against Children**

Membuat Indonesia menjadi salah satu dari 3 negara di dunia sebagai **Pathfinder Country** (Negara Pembuka Jalan) dalam bidang perlindungan anak. Indonesia menjadi contoh global dalam pencapaian target 16.2 SDGs.

Salah satu syarat menjadi Pathfinder Country: Memiliki Strategi/Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan. Stranas PKTA dijadikan referensi utama pelaksanaan **Pathfinder Country** di tingkat nasional.

Global Partnership to End Violence against Children akan membantu Pemerintah dalam menghimpun pengetahuan dan sumber daya global untuk perlindungan anak dari kekerasan di Indonesia. Implementasi Stranas PKTA perlu dijadikan muara bagi program perlindungan anak dari kekerasan di Indonesia

3.1

Melihat pentingnya Fungsi Stranas, Strategi Khusus perlu dijalankan untuk menyosialisasi dan mengadvokasikan Stranas ke pemangku kepentingan nasional hingga desa.

Usulan Sosialisasi dan Advokasi Nasional-Daerah:

- ✓ Menerbitkan berbagai bahan informasi publik terkait Stranas PKTA untuk disebarluaskan (cetak dan elektronik)
- ✓ Stranas PKTA 2016-2020 perlu disosialisasikan secara langsung dan intens kepada jajaran K/L yang bekerja di isu perlindungan anak
- ✓ Informasi Stranas PKTA 2016-2020 perlu diintegrasikan dalam berbagai kegiatan sosialisasi kebijakan/program tematik terkait perlindungan anak yang relevan
- ✓ Strategi advokasi ke pemangku kepentingan daerah perlu disusun dan disepakati, termasuk mekanisme advokasi ke pimpinan daerah (atau forum pimpinan daerah) dan pendampingan ke jajaran SKPD – dapat berupa pedoman penyusunan RAD
- ✓ Diskusi dengan tokoh masyarakat dan akademisi untuk membangun diskursus mengenai penggunaan Stranas PKTA sebagai kebijakan payung perlindungan anak dari kekerasan
- ✓ Pelibatan anak dan orang muda dalam implementasi, monitoring dan evaluasi Stranas

STRATEGI DAN AKSI

STRATEGI

AKSI

1

Area 1: Legislasi dan kebijakan yang melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan di semua latar terjadinya kekerasan

- Harmonisasi regulasi
- Evaluasi Kebijakan
- Identifikasi dan revisi peraturan yang melanggar hak anak
- Advokasi dan sosialisasi kebijakan terkait anak
- Asistensi kepada daerah untuk pengembangan perda

2

Area 2: Mengubah sikap dan norma sosial yang menerima, membenarkan, atau mengabaikan kekerasan

- Kegiatan untuk perubahan perilaku/perspektif yang mendukung kekerasan terhadap anak
- Kegiatan mobilisasi masyarakat
- Kampanye kreatif untuk memberikan pesan anti kekerasan

3

Area 3: intervensi Pengasuhan yang mendukung relasi yang aman dan penuh kasih sayang antara pengasuh kepada anaknya untuk mencegah kekerasan

- Kegiatan pendidikan pengasuhan
- Mendorong komunikasi dan interaksi yang positif antara pengasuh dan anak
- Pelatihan pengasuhan anak secara komprehensif

STRATEGI DAN AKSI

STRATEGI

AKSI

4

Area 4: Meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dan mendukung program wajib belajar (dasar dan menengah) untuk semua anak

- Pendidikan teman sebaya
- Kegiatan penguatan keterampilan hidup dan kesehatan
- Kegiatan pencegahan kekerasan seksual dan kekerasan dalam relasi dekat, termasuk perkosaan

5

Area 5: Layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku, dan anak dalam risiko kekerasan

- Kegiatan bantuan dana dengan atau tanpa kondisi khusus
- Tabungan kelompok dan program bantuan dana yang dikombinasikan dengan pelatihan tentang gender dan perlindungan anak
- Kegiatan keuangan mikro yang dikombinasikan dengan pelatihan tentang gender dan perlindungan anak
- Kegiatan pendekatan konseling
- Skrining kasus dikombinasikan dengan intervensi
- Kelompok pendukung
- Manajemen dan advokasi kasus

6

Area 6: Peningkatan data dan bukti tentang situasi kekerasan terhadap anak, termasuk prevalensi, data kasus, penyebab, dan konsekuensi serta pengembangan model untuk mengurangi kekerasan

- Mekanisme pengumpulan data yang komprehensif
- Perencanaan dan pelaksanaan studi/survei kekerasan anak
- Diseminasi hasil penelitian

Mekanisme Pelaksanaan

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK):

- Fungsi koordinasi dalam pelaksanaan STRANAS PKTA serta penyusunan rencana kegiatan tahunan bersama Kementerian/Lembaga dan kelompok masyarakat.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA):

- Pemantauan, evaluasi, sosialisasi, advokasi, dan bimbingan teknis kepada Kementerian/Lembaga serta organisasi masyarakat dalam pelaksana Stranas baik di tingkat nasional maupun daerah.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas:

- Koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan untuk implementasi Stranas PKTA 2016-2020

- Proses Koordinasi Pelaksanaan dilakukan minimal 3x dalam 1 tahun, difasilitasi oleh 3 Kementerian Koordinator diatas
- Pelibatan masyarakat sipil, kelompok orang muda diwajibkan dalam setiap rapat pelaksanaan.



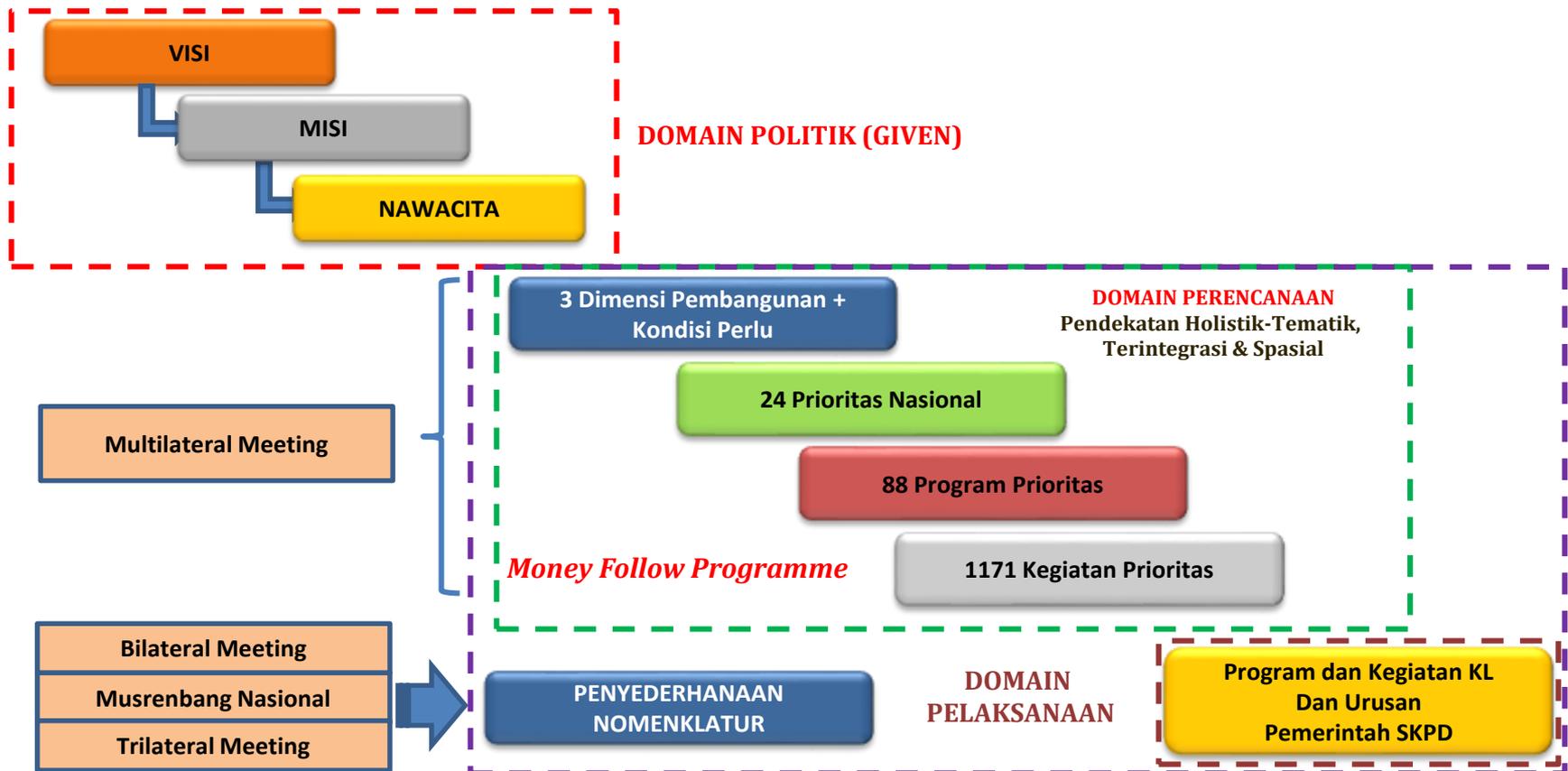
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017



- RKP 2017 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia **Nomor 45 Tahun 2016** tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 memuat :
 - Bab 1. Pendahuluan
 - Bab 2. Tema dan Sasaran Pembangunan
 - Bab 3. Prioritas Pembangunan Nasional
 - Bab 4. Pembangunan Bidang
 - Bab 5. Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah dan Pendanaan Pembangunan
 - Bab 6. Kaidah Pelaksanaan
 - Bab 7. Penutup
- RKP 2017 menjadi pedoman bagi :
 - Pemerintah dalam menyusun RAPBN 2017
 - Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2017
 - Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

PENDEKATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH 2017

Pendekatan Money Follow “Program Prioritas” → Pendekatan Holistik-Tematik,
Terintegrasi & Spasial



- ❑ **Holistik-Tematik**: Untuk tema Kekerasan terhadap Anak, pemahaman tidak saja kepada perlindungan anak atau penegakan hukum, tetapi apa saja upaya holistik untuk menangani hal tersebut, seperti menciptakan suasana pendidikan yang ramah anak, kegiatan pelatihan tentang pengasuhan untuk anak, akses anak untuk ke sekolah yang aman, KIE yang terus menerus kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, pelayanan kesehatan untuk penanganan korban, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).
- ❑ **Integratif**: Penghapusan/penurunan kekerasan terhadap anak perlu dilakukan secara terintegrasi melalui upaya koordinatif dengan melibatkan banyak stakeholder. Untuk mencapai sasaran prioritas nasional penurunan kekerasan terhadap anak, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, , Kementerian KesehatanKementerian Agama, dan Kementerian Hukum dan HAM serta Pemerintah Daerah.
- ❑ **Spasial**: penanganan kekerasan terhadap anak misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, populasi anak, prevalensi kejadian kekerasan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan pusat pelayanan terpadu penanganan kekerasan (P2TP2A). berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017:

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

- **Revolusi Mental**
- **Pendidikan**
- **Kesehatan**
- Perumahan dan Permukiman

PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

- Kedaulatan Pangan
- Kedaulatan Energi
- Maritiman dan Kelautan
- Pembangunan Pariwisata
- Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

- Antar Kelompok Pendapatan
- Reforma Agraria
- Daerah Perbatasan
- Daerah Tertinggal
- Desa dan Kawasan Pedesaan
- Perkotaan
- Konektivitas

PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN

- **Reformasi Regulasi, Kepastian Dan Penegakan Hukum**
- Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban
- Konsolidasi Demokrasi Dan Efektivitas Diplomasi
- Reformasi Birokrasi.

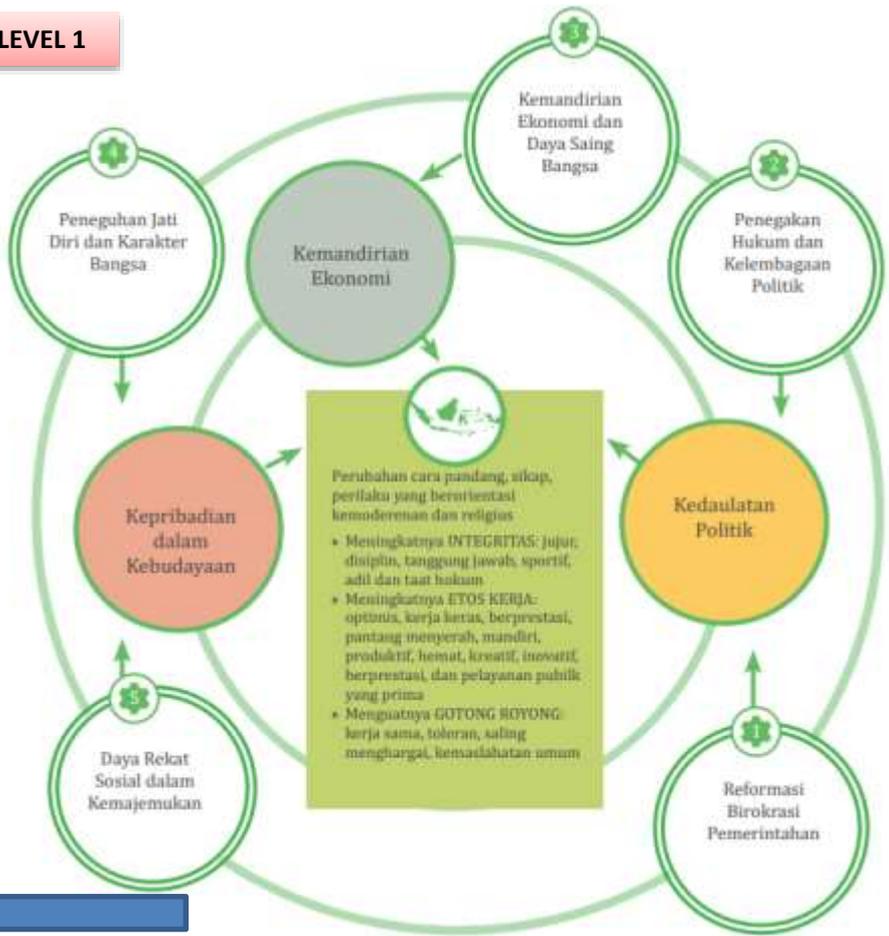
PEMBANGUNAN EKONOMI

- Perbaikan Iklim Investasi Dan Iklim Usaha
- Peningkatan Ekspor Nonmigas
- Reformasi Fiskal

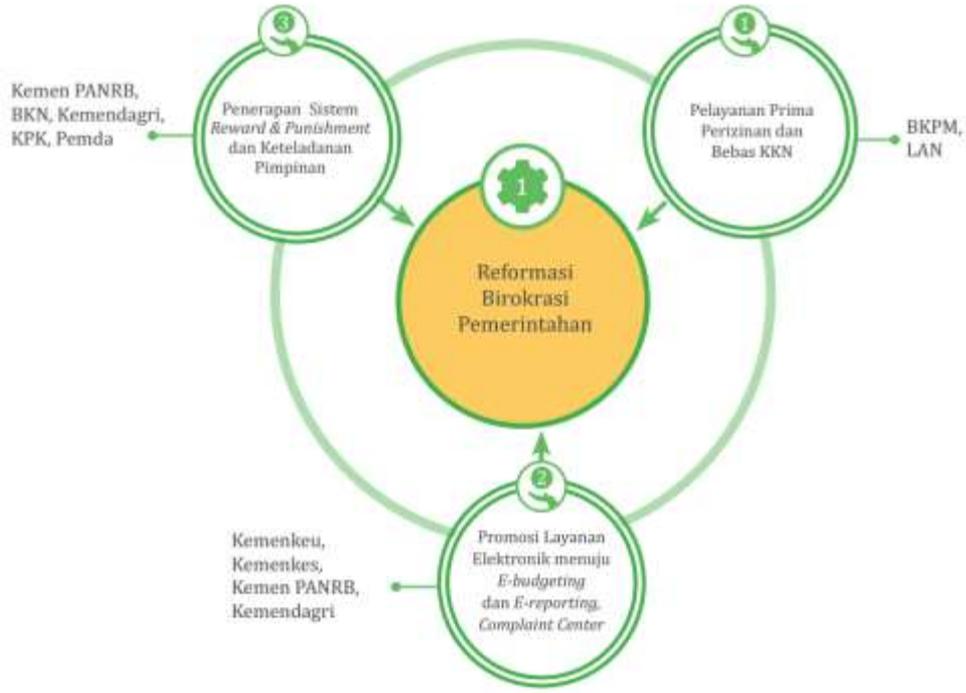
REVOLUSI MENTAL

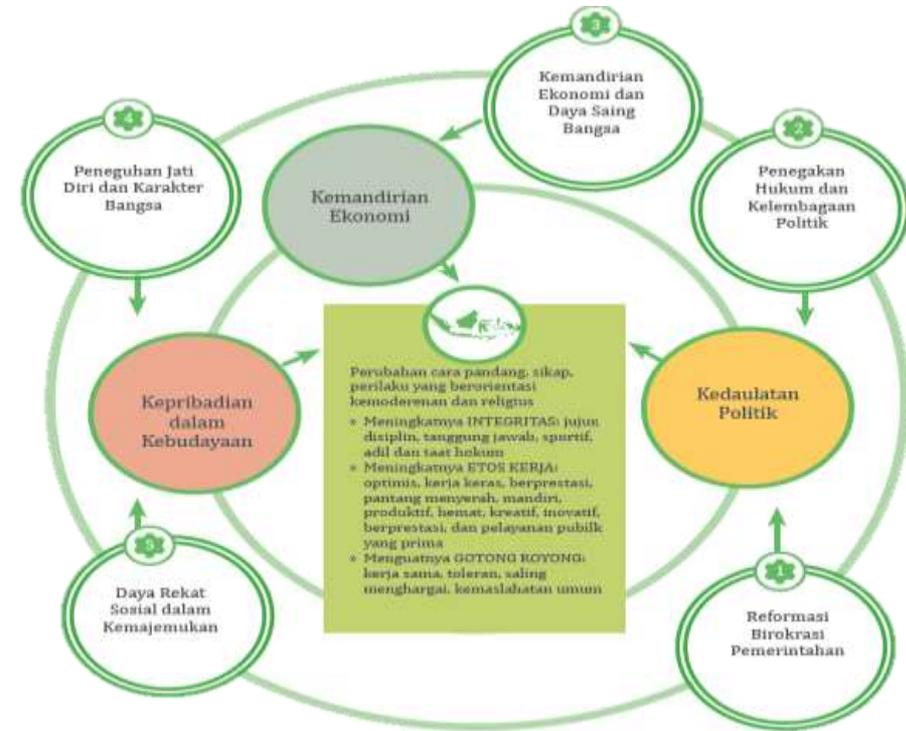
Program dan Kegiatan Prioritas

LEVEL 1



LEVEL 2





PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	TARGET 2017
Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum	Gerakan Aparat Menuju Indonesia Ramah	34 Provinsi
	Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan	Rekomendasi harmonisasi dan simplifikasi undang-undang yang ditindaklanjuti	100%
Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Pelayanan Prima Perizinan dan Bebas KKN	Indeks kepuasan masyarakat atas mutu pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal	3,2 dari skala 4 (minimal B)
	Promosi Layanan Elektronik menuju <i>E-budgeting</i> dan <i>E-reporting, Complaint and Handling Center</i>	Sistem rujukan <i>online</i> di RS dan puskesmas	4 RS dan 2 puskesmas
Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa	Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri	Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional	92,40%
	Internalisasi Nilai-Nilai dan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat	Pemahaman dunia usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	60%
Penguatan Jati Diri dan Karakter Bangsa	Pendidikan Berbasis Karakter	Pendidikan karakter	Seluruh satuan pendidikan
	Lingkungan Satuan Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan	Model Sekolah dan Pesantren Ramah Anak di seluruh provinsi	40 sekolah dan 5 pondok pesantren
Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan	Toleransi dan Hidup Rukun	Dialog lintas agama	200 Kab/Kota dan 1.000 Kecamatan
		Penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama	34 provinsi
	Peran Lembaga Agama, Keluarga dan Media Publik dalam Persemaian Nilai-Nilai Budi Pekerti	Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang dibina	75%

REVOLUSI MENTAL

Sasaran dan Arah Kebijakan

INDIKATOR	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2019
1. Meningkatnya Integritas					
▪ Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 1-5)	3,61	3,59	3,63	3,70	3,75
▪ Indeks Penegakan Hukum Berkualitas (Skala 0-1)	0,34	0,36	0,38	0,40	0,44
▪ Meningkatnya kepatuhan terhadap kode etik dan aturan hukum serta disiplin Aparatur Penegak Hukum/PNS (Skala 1-5)	n.a	n.a	n.a	4	5
▪ Persentase Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah) yang melaporkan status pelanggaran hukum disiplin pegawai	25%	32%	60%	80%	100%
▪ Persentase keterbukaan penanganan kasus pidana	50%	55%	60%	75%	90%
▪ Peningkatan kualitas dan penurunan beban peraturan perundang-undangan	<i>(Indikator akan dikembangkan lebih lanjut)</i>				
2. Meningkatnya Etos Kerja					
▪ Tingkat kepatuhan Kementerian, Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam penerapan standar pelayanan publik pada unit pelayanan					
– Kementerian	11,8 %	17,0 %	38,0 %	58,0 %	100%
– Lembaga	8,1 %	10,0 %	32,5 %	55,0%	100%
– Provinsi	n.a	9,00 %	31,75 %	54,5%	100%
– Kabupaten/Kota	n.a	1,00 %	15,75 %	30,5 %	60,0 %
▪ Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional	n.a	92,3%	92,5%	92,7%	93,1%
▪ Peningkatan semangat kewirausahaan di masyarakat	↑	↑	↑	↑	↑
▪ Perilaku hidup bersih dan sehat	30%	40%	50%	60%	80%
3. Meningkatnya Gotong Royong					
▪ Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, dan rasa aman)	0,55 (2012)	↑	↑	↑	↑
▪ Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat	-	<5	<5	<5	<5
▪ Persentase ruang publik yang bebas muatan negatif (penyebarkan kebencian, radikalisme dan pornografi)	100%	100%	100%	100%	100%
▪ Indeks Pembangunan Gender	70,5 (2013)	↑	↑	↑	↑

ARAH KEBIJAKAN

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN

1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan Birokrasi yang responsif)
2. Program pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif
3. Penerapan disiplin, *reward & punishment* dan sistem merit dalam birokrasi

PENEGAKAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN POLITIK

1. Penegakan hukum, kode etik dan disiplin aparat Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat
2. Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan-undangan untuk mendorong kreatifitas masyarakat
3. Penanganan perkara yang transparan dan memuaskan
4. Pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik

PENEGUHAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA

1. Pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur dan kerja keras)
2. Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan (*bullying free school environment*)
3. Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi)
4. Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air

PENGUATAN DAYA REKAT SOSIAL DALAM KEMAJEMUKAN

1. Pengembangan ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian
2. Peningkatan kerjasama dan kesetiakawanan sosial
3. Peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik yang mengajarkan perdamaian dan toleransi

PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAN DAYA SAING BANGSA

1. Peningkatan Etos Kerja (kerja keras, kreatif, dan profesional) serta mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan
2. Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri
3. Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat (*cooperate and compete*, bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah)

INDIKATOR	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2019
▪ Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,2 tahun	8,3 tahun	8,5 tahun	8,6 tahun	8,8 Tahun
▪ Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	94,1% (2013)	94,8%	95,1%	95,4%	96,1 %
▪ Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B	50,4% (2013)	55,9%	58,8%	61,8%	68,4 %
▪ Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7%	73,9%	76,5%	79,0%	84,2%
▪ Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	62,5%	68,7%	71,8%	74,8%	81,0%
▪ Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5%	77,2%	79,1%	80,9%	84,6%
▪ Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2%	53,8%	56,6%	59,4%	65,0%
▪ Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,85 (2012)	0,86	0,87	0,88	0,90
▪ Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,07 (2012)	0,29	0,36	0,42	0,54
▪ Nilai Test PISA	(2012)				(2018)
- Matematika	375	n.a.	n.a.	n.a.	427
- Sains	382	n.a.	n.a.	n.a.	438
- Membaca	396	n.a.	n.a.	n.a.	446
▪ Meningkatnya guru yang memiliki kompetensi profesional dan pedagogi (subject knowledge dan pedagogical knowledge)					
▪ Meningkatnya integritas lingkungan pendidikan -SD-PT- (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme)					
▪ Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi serta kekerasan (bullying free environment)					
▪ Terlaksananya kurikulum dan proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman					
▪ Terlaksananya pendidikan agama dan etika yang menumbuhkan akhlak mulia					

ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perkuatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan zaman, serta perkuatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel
3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru yang merata
4. Revitalisasi LPTK untuk meningkatkan mutu pendidikan keguruan
5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini
6. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
7. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi
8. Meningkatkan kualitas pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

ARAH KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG REVOLUSI MENTAL

1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter/budi pekerti dan budaya bangsa
2. Menciptakan lingkungan pendidikan yang menumbuhkan integritas, bebas intimidasi dan kekerasan
3. Menegakkan hukum dan disiplin (bebas dari ijazah dan sertifikat palsu, plagiat, bolos)

Program Sarjana Mengajar di daerah 3T (SM-3T)

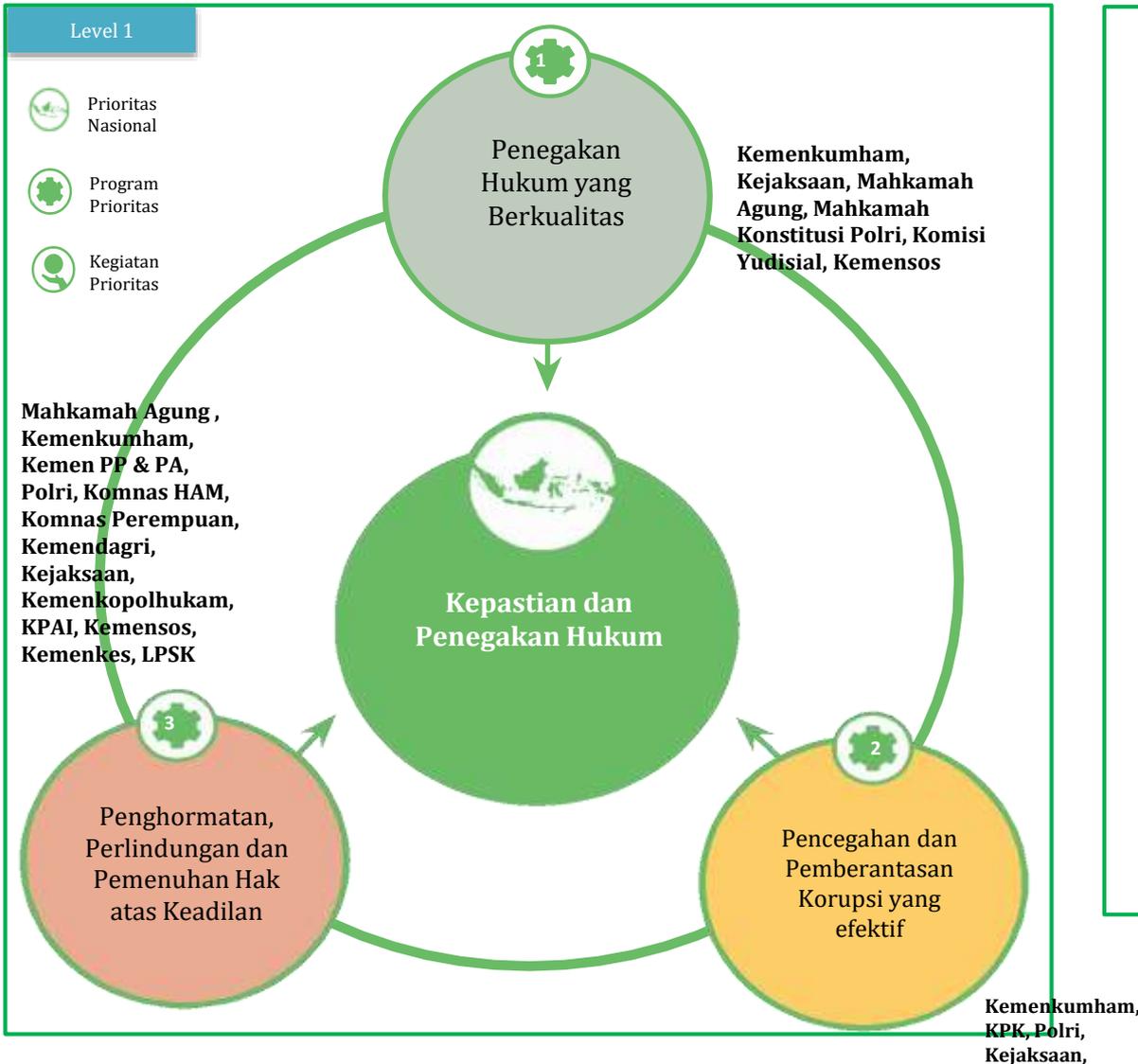
Tujuan: Menjamin semua sekolah di seluruh pelosok wilayah Indonesia dilayani oleh tenaga pendidik yang cukup dan cakap, melalui penempatan Sarjana Pendidikan di daerah 3T selama satu tahun sebagai upaya penyiapan pendidik profesional yang akan dilanjutkan dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).



Keterangan:

- Peserta SM-3T Tahun 2017 sejumlah **3.020 guru**. Sebaran angka sasaran per lokasi masih perkiraan dan penetapan peserta berdasarkan seleksi.
- Peserta SM-3T memiliki pengalaman mengajar di daerah 3T, sehingga lebih siap untuk ditempatkan sebagai guru PNS di daerah tersebut (Guru Garis Depan).

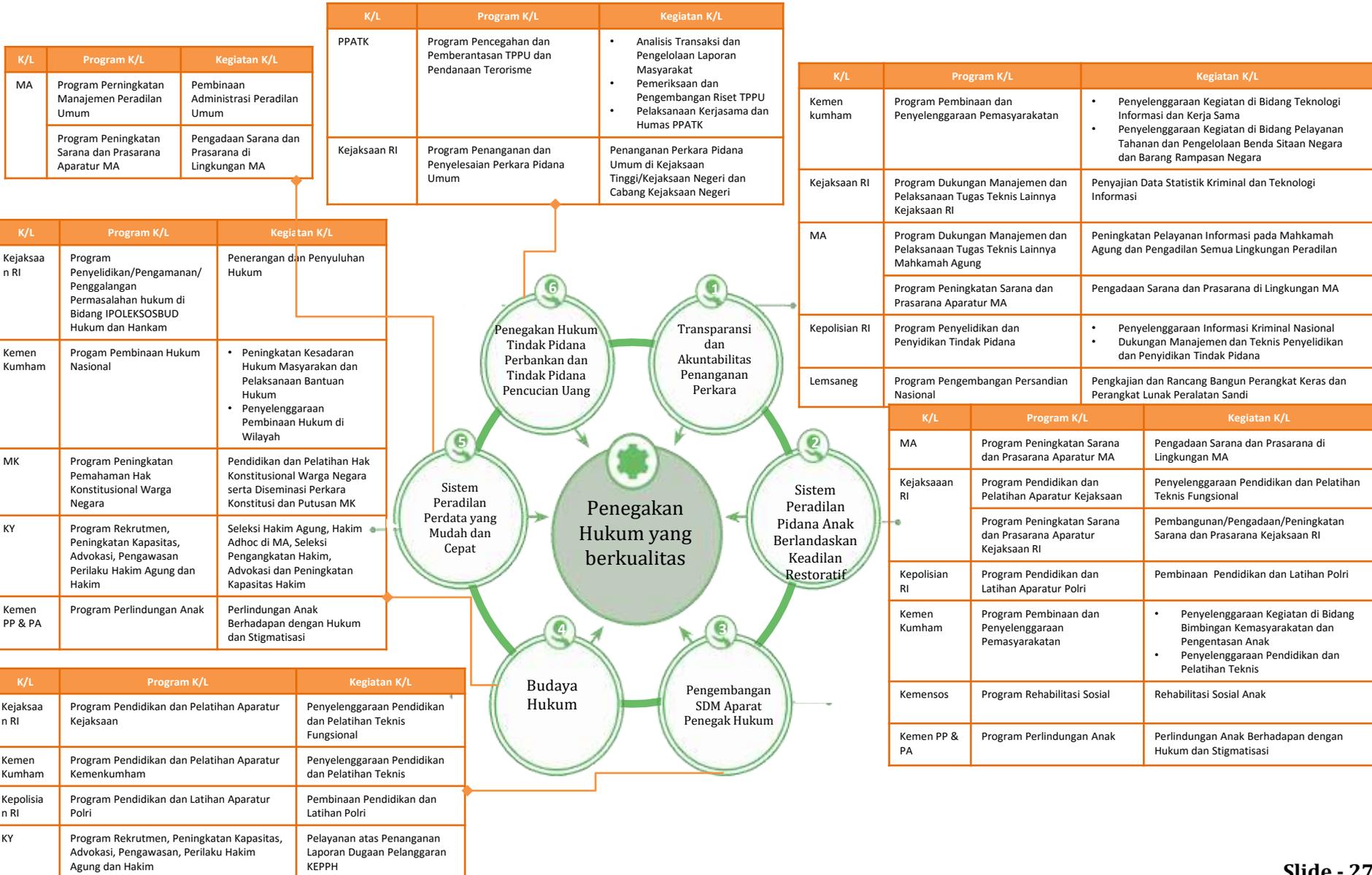
HIGHLIGHT PN KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM



Penyempurnaan hasil Musrenbangnas:

- Mayoritas usulan aktivitas daerah diusulkan untuk mendukung kegiatan prioritas Sistem Peradilan Pidana Anak Berlandaskan Keadilan Restoratif dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Namun, beberapa usulan tersebut tidak sejalan dengan fokus yang telah ditentukan sehingga sebagian besar ditolak. Beberapa usulan yang diterima dengan catatan perlu merubah targetnya agar sejalan dengan fokus berikut:
 1. Fokus Kegiatan Prioritas Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif adalah Optimalisasi upaya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tiap tahapan penanganan perkara; SDM aparat penegak hukum yang kompeten dalam penanganan ABH; serta sarana dan prasarana yang memadai untuk implementasi keadilan restoratif bagi ABH.
 2. Fokus Kegiatan prioritas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelaksanaan Penanganan Terpadu kasus terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dan Anak serta Penyediaan sarana prasarana untuk SPPT-PKKTP.

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM YANG BERKUALITAS

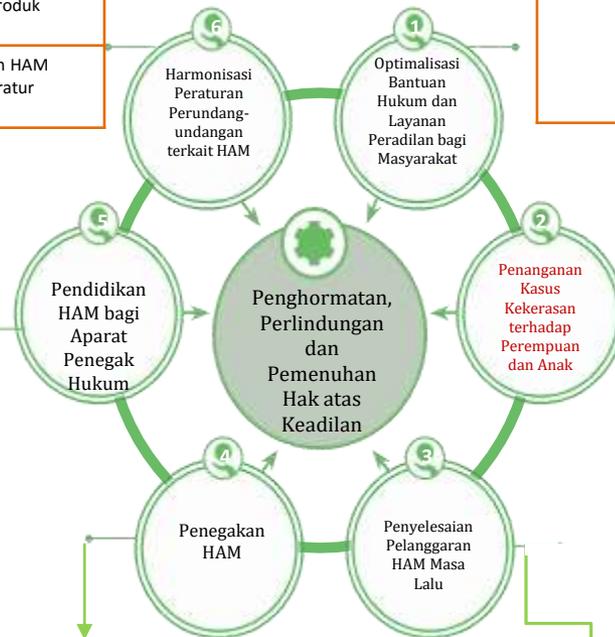


PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN

K/L	Program K/L	Kegiatan K/L
Kemen Kumham	Program Penelitian dan Pengembangan Kemen Kumham	Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
	Pemajuan HAM	Analisa, Penyiapan dan Laporan Instrumen HAM
Kemendagri	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendagri	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum
	Program Bina Otonomi Daerah	Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah
Komnas HAM	Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara

K/L	Program K/L	Kegiatan K/L
Kemen Kumham	Program Pembinaan Hukum Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah
MA	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Pembinaan Administrasi Peradilan Militer dan TUN

K/L	Program K/L	Kegiatan K/L
Kemen Kumham	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenkumham	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah
Kejaksaan RI	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
POLRI	Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri
Komnas HAM	Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara
Kemen PP & PA	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga



K/L	Program K/L	Kegiatan K/L
POLRI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Penindakan Tindak Pidana Umum
Kejaksaan RI	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
Kemen PP & PA	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
	Program Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak
Setneg	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen Setneg	Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban dan Dukungan Lainnya di Lingkungan LPSK
Kemensos	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak
Komnas HAM	Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	Pencegahan dan Penganggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban

K/L	Program K/L	Kegiatan K/L
Kemen Kumham	Program Pemajuan HAM	Pelayanan Komunikasi Masyarakat
Komnas HAM	Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Kemen PP & PA	Program Perlindungan Anak	Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi

K/L	Program K/L	Kegiatan K/L
Kejaksaan RI	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Agung Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung
Komnas HAM	Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Kemenko Polhukam	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM
Kemen PP & PA	Program Perlindungan Anak	Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI)

HIGHLIGHT PEMBAHASAN MUSRENBANGNAS 2016

KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Sumatera Utara

Program Prioritas Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan

Rehabilitasi Psikososial di RPTC

Advokasi Kegiatan P2TP2A dalam Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Riau

Program Prioritas Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan:

Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan dan KDRT

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Korban Perdagangan Orang di RPTC

Perlindungan Khusus bagi Anak di RPSA dan Shelter di Kab. Siak

Gorontalo

Program Prioritas Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan:

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Korban Perdagangan Orang di RPTC

Sulawesi Utara

Program Prioritas Penegakan Hukum yang Berkualitas:

Bimbingan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi ABH dengan Disabilitas

Program Prioritas Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan:

Penyusunan Pedoman Teknis Kebijakan Perlindungan Anak

Penyusunan Kebijakan yang Responsif terhadap Perempuan Korban Kekerasan di Daerah

Advokasi dan Pelatihan SDM tentang Penanganan dan Pendampingan Korban KDRT

Kampanye Gerakan "He For She" di Kab. Kep. Sitaro

Pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (PSO) Penanganan Kasus TPPO

Advokasi kepada Apgakum tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi

Bengkulu

Program Prioritas Penegakan Hukum yang Berkualitas:

Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk ABH



Sulawesi Tengah

Program Prioritas Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Korban Perdagangan Orang di RPTC

Lampung

Program Prioritas Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan:

Penyusunan Kebijakan yang Responsif terhadap Perempuan Korban Kekerasan di Daerah

DIY Yogyakarta

Program Prioritas Penegakan Hukum yang Berkualitas:

Layanan PKSA bagi ABH

Sulawesi Selatan

Program Prioritas Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan:

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Korban Perdagangan Orang di RPTC

Penyusunan Kebijakan Perlindungan Lansia dan Perempuan Penyandang Disabilitas

Jawa Barat

Program Prioritas Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan:

Fasilitasi Penanganan Korban KDRT

Nusa Tenggara Timur

Program Prioritas Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan:

Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan

Advokasi dan Pelatihan SDM tentang Penanganan dan Pendampingan Korban KDRT

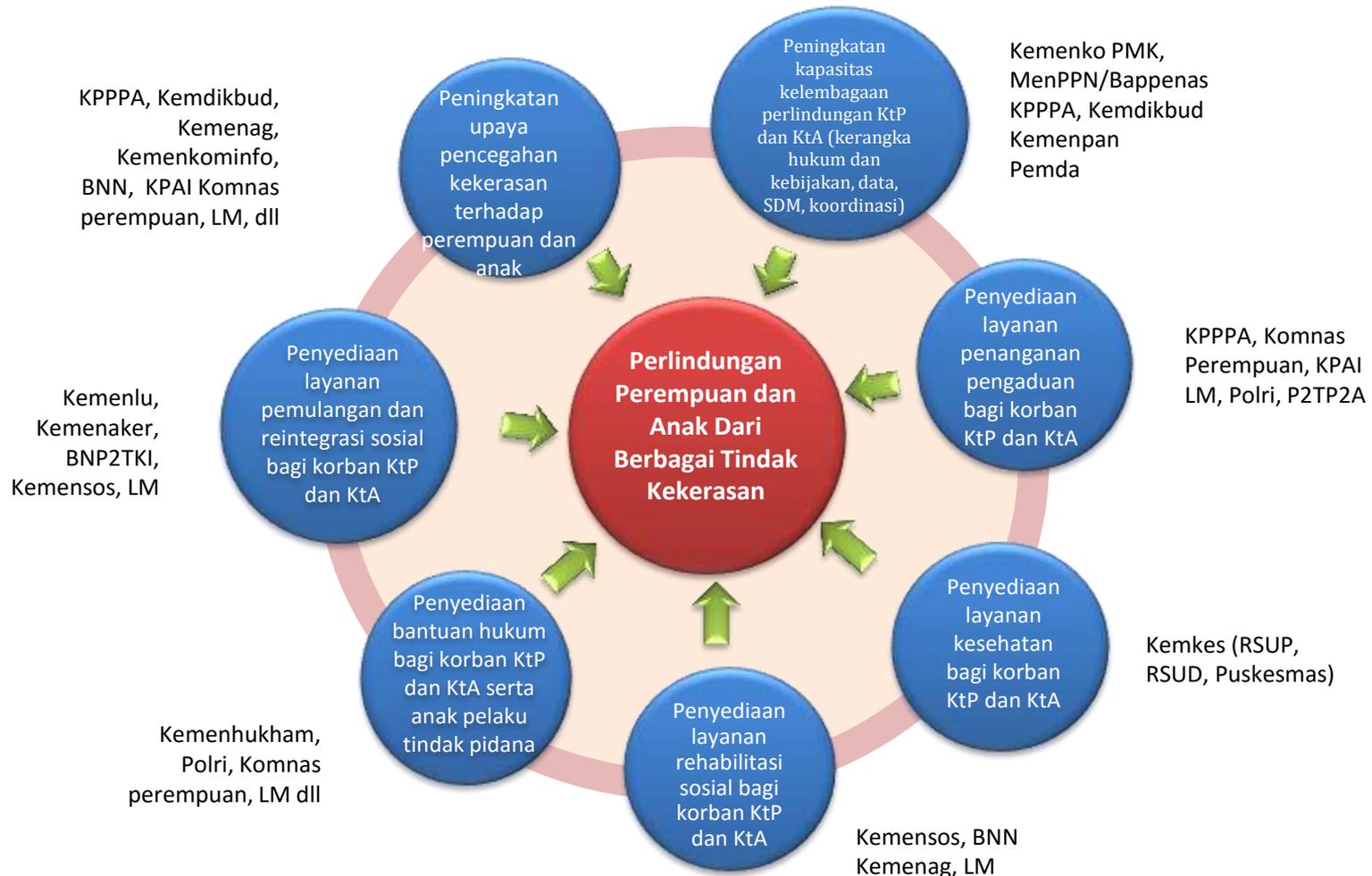
Nusa Tenggara Barat

Program Prioritas Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan:

Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan dan KDRT

Indikator	Target Nasional RKP 2017
Indeks Pembangunan Hukum (Skala 0-1)	0,69 – 0,71
Indeks Persepsi Korupsi (Skor)	38
Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 0-5)	3,63

PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PENDEKATAN LINTAS SEKTOR



Terima Kasih!

